

Evaluasi Program Perhutanan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Atika Syafa Amalia¹, Akbar Maulana²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; Atikasyafa.090301@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember; Akbar.maulana@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Program Perhutanan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Program perhutanan sosial merupakan suatu program yang memberikan hak akses kelola legal kepada masyarakat dimana dampak adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penelitian ini memiliki tujuan diantaranya yaitu untuk mengevaluasi program perhutanan sosial di desa sidodadi agar kita mengetahui apakah program perhutanan sosial ini sudah berjalan efektif sesuai dengan rencana di awal atau sebaliknya malah terjadi kendala dikarenakan permasalahan selanjutnya memberikan gambaran mengenai program pengelolaan perhutanan sosial di desa sidodadi dalam menanggulangi peruntukan taraf hidup kesejahteraan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara kepada beberapa narasumber dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program perhutanan sosial belum berjalan secara efektif dikarenakan terdapat permasalahan yang terjadi baik itu di lapangan maupun pada teknis. Jika dilihat secara ketepatan program perhutanan sosial sudah tepat dilaksanakan di desa sidodadi adanya program ini memberikan dampak pada perubahan taraf hidup kesejahteraan

Keywords: Evaluasi, Program Perhutanan Sosial, Kesejahteraan

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.124>

*Correspondensi: Atika Syafa Amalia dan Akbar Maulana

Email: email@e-mail.com

Received: 01-11-2023

Accepted: 15-12-2023

Published: 25-01-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

which has been properly implemented in Sidodadi village, this program has had an impact on changes in the welfare standard of living.

Keywords: Evaluation, Social Forestry Program, Welfare

Abstract: This research discusses the Evaluation of the Social Forestry Program for Community Welfare in Sidodadi Village, Tempurejo District, Jember Regency. The social forestry program is a program that provides legal management access rights to the community where the impact of this program can improve community welfare. This research aims, among other things, to evaluate the social forestry program in Sidodadi village so that we know whether this social forestry program has been running effectively according to the initial plan or, on the contrary, there are obstacles due to subsequent problems, providing an overview of the social forestry management program in Sidodadi village in overcoming it. changes in the welfare standard of living. This research was carried out using a qualitative descriptive approach, with data collection methods in the form of interviews with several sources using purposive sampling techniques. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results of this research show that the social forestry program has not been running effectively because there are problems that occur both in the field and technically. If we look at the accuracy of the social forestry program which has been properly implemented in Sidodadi village, this program has had an impact on changes in the welfare standard of living.

Pendahuluan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan bahwa terdapat 28.856 desa dengan berlokasi disekitar hutan, secara keseluruhan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada hutan. Namun masih terdapat beberapa desa yang kehidupan masyarakatnya kurang memungkinkan dikarenakan masyarakatnya tidak dilibatkan dalam pengelolaan (Fisher, 2018). Beberapa pihak beranggapan bahwa masyarakat tersebut kurang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan kawasan hutan dan hanya memanfaatkan hasil hutan tanpa memperhatikan faktor lingkungan sekitar. Pemerintah melalui KLHK telah menurunkan Program Perhutanan Sosial (PS) dimana program ini telah tertuang pada Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomer 09 tahun 2021 dengan tertuliskan bahwa program perhutanan sosial merupakan Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku (Rakatama, 2020). Program ini bertujuan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola hutan yang mana hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan hutan desa. SFi adalah sistem pengelolaan berkelanjutan yang diterapkan pada kawasan hutan negara atau hutan milik milik/adat oleh masyarakat hukum setempat atau hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. PS dilaksanakan dalam bentuk Desa (HD), Komunitas (HKm), Perkebunan Rakyat (HTR), Adat (HA). (Roslinda et al., 2022) Program perhutanan sosial ini sangat penting jika diimplementasikan dengan baik karena ini merupakan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa di sekitar hutan (Erbaugh, 2019; Fisher, 2019).

Salah satu wilayah desa yang mendapatkan program perhutanan sosial ialah Desa Sidomukti, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Dalam menjalankan Sistem pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat perlu memiliki perencanaan dan pengorganisasian yang tepat. (Oleh & Azhar, 2021) Selanjutnya dalam suatu program pasti terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung tidak sepenuhnya program didukung secara penuh pasti ada penghambat Maka dengan begitu hal tersebut yang mendasari peneliti melakukan penelitian untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial di desa sidodadi agar dapat mengetahui apakah program tersebut telah berjalan efektif atau tidak (Ludvig, 2018).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya dengan menggunakan pembahasan yang sama, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ananda Mahardika, Hastuti Sri Muyani dengan berjudul " Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan". Hasil menunjukkan bahwa Program perhutanan sosial merupakan akses masyarakat kawasan hutan untuk mencapai kemakmuran secara legal formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (Wong, 2020). Dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Oleh karena itu pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus sesuai dengan kriteria yang tertera. karena akses legal ini memberikan jaminan kepada masyarakat untuk

mengelola hutan selama 35 tahun. Untuk unjuk dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mahardika & Muyani, 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lodewik Zet Fajri Iramaya Purwanti, Rudiana, Herzainul Nur Hakim, Muhammad Adnantelah melakukan penelitian dengan judul “Peran Program Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Di Sekitar Kawasan Hutan (Studi kasus Indept Interview Perhutanan Sosial Fungsi Statistik Kehutanan BPS 2021) Dapat menyimpulkan bahwa lahan milik sendiri, lahan perhutanan sosial, skemahutan desa, dan bantuan uang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Di samping itu, terdapat variabel yang tidak signifikan, yaitu lamanya masyarakat dalam mengikuti program perhutanan sosial. (J Hut Trop, 2022) Berdasarkan penelitian yang dilakukan ananda mahardika dan lodewik hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sistem pengelolaan program perhutanan sosial kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Desa Sidodadi. Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Metode

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. . (J.Moleong (2017:6)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa sidodadi karena merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang melaksanakan program perhutanan sosial. Ini Dan masih adanya hambatan permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pengelolaan program perhutanan sehingga program ini tidak berjalan secara efektif .Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2023

Metode Penentuan Informan

Narasumber atau informan adalah pihak yang menjadi sumber dari data penelitian yang akan diperoleh. Narasumber atau informan umumnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang dapat dikatakan sebagai ahli dalam bidang atau objek tertentu. Di samping itu, adapun narasumber atau informan yang diperlukan terkait dengan objek pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan sebagai berikut: Ketua Pegurus Gapoktanhut Sidomukti, Bendahara Gapoktanhut Sidomukti dan Ketua Tani Hutan 3 Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi: pertama, observasi dengan jenis observasi partisipan dengan melibatkan diri secara langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan guna memperoleh data informasi yang akurat,serta mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi (Sahide, 2020a). Kedua,wawancara secara terbuka (tidak terstruktur) dan tertulis agar informan dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya,yang melalui komunikasi secara tanya jawab langsung dan mendalam terkait dengan permasalahan yang teliti.Ketiga,dokumentasi untuk menghasilkan data yang didapatkan dari catatan penting berupa tulisan, gambar, hasil rekaman, catatan harian saat proses wawancara (Price, 2018).

Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obeservasi atau penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung berupa literatur ilmiah seperti buku dan jurnal ilmiah. Dalam mengumpulkan data primer, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data cara yang paling penting untuk menguji keabsahan pada hasil penelitian.Metode yang digunakan adalah dengan melakukan triangulasi. Dengan itu untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi meliputi 3 aspek yaitu 1. Triangulasi Sumber Data memperoleh informasi dengan cara mewawancarai informan A dan informan lainnya namun masih dengan pertanyaan yang sama, Triangulasi Metode Peneliti observasi turun langsung ke lapangan dan mewawancarai kembali terhadap informan yang sudah ditentukansebelumnya, dan yang terakhir Triangulasi Waktu, melakukan wawancara kepada informan berkali kali namun dengan estimasi waktu yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi program merupakan suatu proses yang secara eksplisit mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. (Muryadi, 2017) penelitian yang ditetapkan meliputi indikator : a) Efektifitas Kebijakan, dengan 3 indikator yaitu efektif dalam menyediakan sumber tenaga kerja, efektif dalam peningkatan ekonomi warga masyarakat dan efektif dalam pengembangan kewilayahan; b) Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan, melalui indikator efisien dalam waktu, efisien tenaga, dan efisien biaya (Lejiu et al., 2017) c) Kecukupan terhadap kebutuhan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai dan atau kesempatan; d). Perataan dalam Pelaksanaan kebijakan, diukur melalui indikator apakah manfaat program telah dirasakan oleh kelompok-kelompok sasaran; e). Responsivitas, dengan menjelaskan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu (Tajuddin, 2019). Apakah adaperubahan

yang berarti bagi pencapaian kepuasan bagi kelompokkelompok tersebut; f). Ketepatan Program, yaitu ketepatan dari pilihan kebijakan yang akan diukur melalui indikator hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program yang dirasakan masyarakat dibandingkan dengan maksud dan tujuan,

1. Aspek Efektifitas

Berdasarkan Aspek Efektifitas Program perhutanan sosial merupakan suatu program yang memberikan akses legal pada masyarakat dimana dampak adanya rogram ini memang dapat meningkatkan kesejahteraan, (Octavia, 2022) Namun sejauh ini program perhutanan sosial di desa Sidodadi masih belum berjalan secara efektif,dikarenakan masih terdapat permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga pada kepengurusan, salah satunya permasalahan di lapangan yaitu terhadap bibit dimana masyarakatnya tidak mengikuti arahan serta tidak mau berusaha untuk membeli bibit sendiri, petani masih mengandalkan pemberian bibit dari pengurus. (Rogelja, 2018) Sedangkan permasalahan pada pengurus yaitu munculnya regulasi baru yang dinamakan khdbk yang dimana hingga saat ini pengurus gapoktanhut belum mengetahui hak & kewajiban petani pada regulasi ini

2. Aspek Efisiensi

Berdasarkan Aspek Efisiensi. Program perhutanan sosial memiliki tujuan jangka waktu panjang memperbaiki kondisi lahan hutan yang kritis,meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agusti et al., 2019). Dan sesuai dengan SK yang tercantumkan bahwa program perhutanan sosial memiliki hak kelola lahan yang berjalan selama 35 thn. namun mengenai waktu yang dibutuhkan dalam pengelolaan hutan untuk menjadi lestari sampai saat ini pengurus kps masih belum bisa memprediksi dikarenakan mengalami kendala.terhadap masyarakat yang memang sangat sulit untuk mengikuti arahan serta terdapat lahan yang kondisinya tidak mendukung, Jika masyarakat dari awal masyarakat mengikuti arahan dan pengurus kps bertindak atas persoalan tersebut bisa dikatakan 3 tahun program akan berjalan secara baik hutanpun lestari (Bong, 2019). Mengenai dana, Pemerintah pusat tidak memberikan dana dalam program ini namun mendapatkan bantuan dari pemerintah desa ketahanan pangan berupa bibit alpukat sebanyak 2000 pohoni

3. Aspek Kecukupan

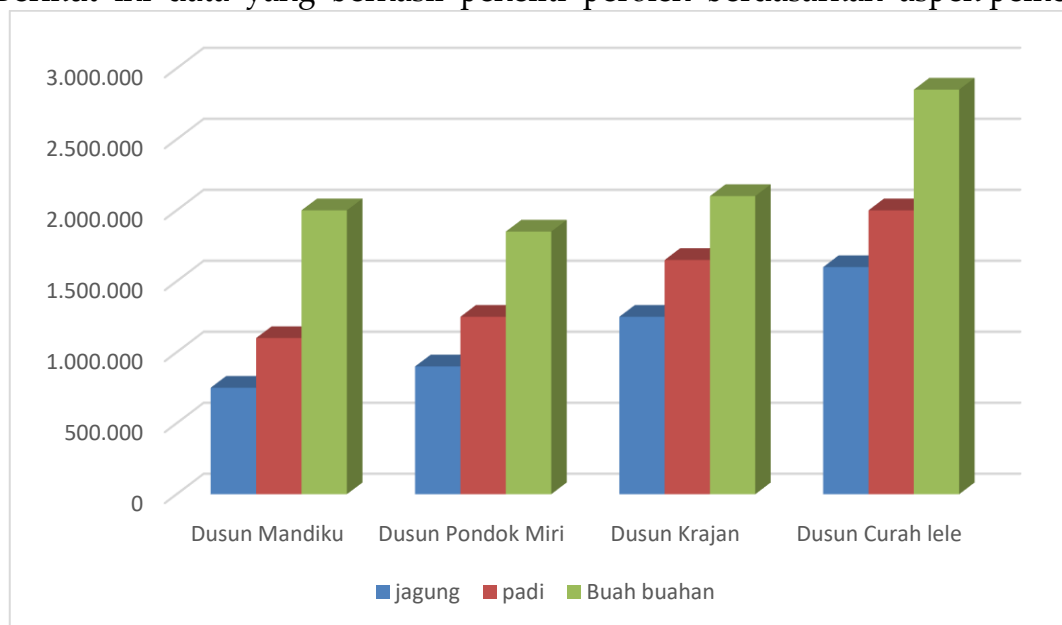
Berdasarkan Aspek Kecukupan Dalam suatu program pasti ada namanya pro dan kontra ada sebuah dukungan dan ada penolakan,sama hal nya pada program perhutanan sosial yg terjadi desa sidodadi dimana terdapat beberapa masyarakat sangat puas adanya program ini dikarenakan mereka sudah mendapatkan surat perizinan hak akses legal, Saat ini petani tidak dipermasalahkan ketika masuk di wilayah kawasan hutan berbeda dengan dahulu dimana petani selalu dipermasalahkan oleh pihak perhutani karena tidak mempunyai perizinan (Wulandari, 2018). Namun Setelah diturukannya sk petani memiliki kebebasan

dalam mengelola lahan selama 35 tahun dapat diketahui program ps mendapatkan dukungan penuh dari pihak rektoral namun disisi lain ada beberapa masyarakat yang merasa tidak puas malah memunculkan rasa iri

4. Aspek Pemerataan

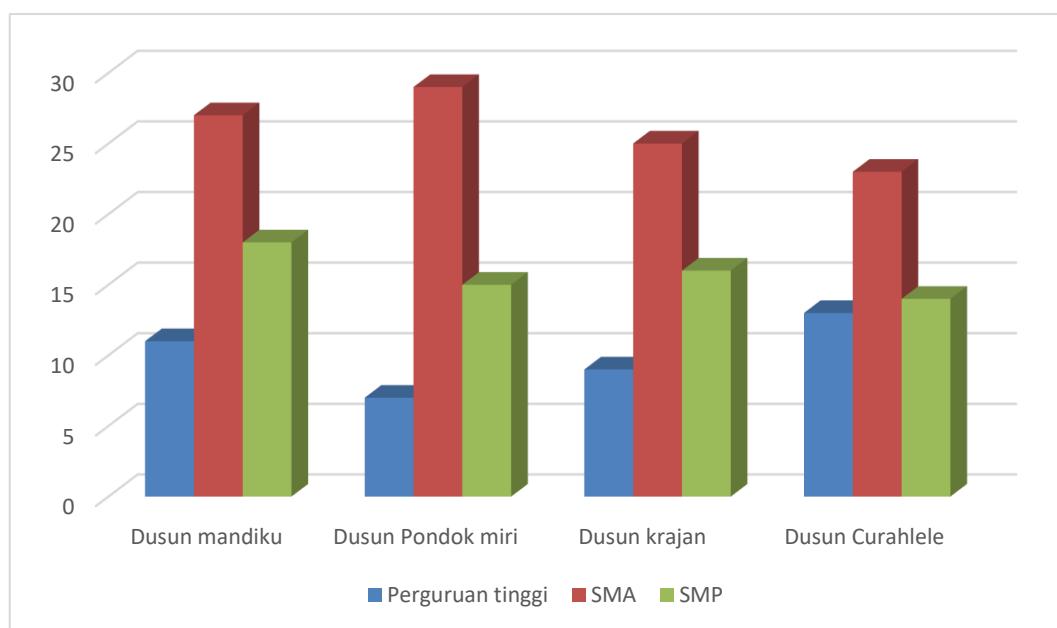
Berdasarkan Aspek Pemerataan masyarakat desa sidodadi tidak semuanya terdaftar dalam anggota kps , hanya beberapa yang terverifikasi sesuai dengan persyaratan yang tertera lalu adapun manfaat bagi masyarakat yg tergabung dalam anggota kps dimana pada mulanya masyarakat tidak merasakan adanya manfaat hutan, saat ini mereka bisa merasakan manfaatnya (Sahide, 2020b).

Berikut ini data yang berhasil peneliti peroleh berdasarkan aspek pemerataan:



(Diagram 1.kesejahteraan masyarakat adanya program perhutanan sosial)

Program perhutanan sosial merupakan salah satu program strategis pemerintah (Zet & et al., n.d.). Program perhutanan sosial ini suatu program yang memberikan akses legal pada masyarakat dimana dampak adanya program ini memang dapat meningkatkan kesejahteraan, jika dilihat kondisi masyarakat setelah mendapatkan hak akses legal mereka sangat bersyukur sudah sepenuhnya memiliki hak untuk mengelola lahan hutan,sudah tidak merasa takut dan cemas dalam mengelola dan mereka sangat menikmati hasil panen nya (Lo, 2021). Dimana adanya hak kelola hutan di sidodadi ini menjadikan masyarakat yang dulunya bekerja di luar kini mereka cukup memanfaatkan lahan hutan dan tidak mengharuskan mereka untuk kembali bekerja diluar.



(Diagram 2 Aspek pendidikan)

Lalu jika pada aspek pendidikan dimana sebelum adanya program pengelolaan hutan mayoritasnya anak-anak desa sidodadi hanya sampai tamat sekolah menengah pertama mirisnya lagi ada yg sampai putus sekolah dikarenakan orang tua yg sudah tidak mampu membayar tanggungan sekolah bahkan mereka memilih untuk menikah muda (Maier, 2018). Niat hati ingin bisa menyekolahkan anak sampai jenjang yg lebih tinggi dan menjadi orang sukses namun karena kondisi ya gimana lagi syukur-syukur masih bisa menyekolahkan sampai tamat SMA "Ucap keluh kesah masyarakat. Dengan adanya program pengelolaan hutan memberikan dampak perubahan dari sektor pendidikan.

5. Aspek Responsive

Berdasarkan Aspek Responsive Masyarakat sangat senang adanya program perhutanan sosial ini dikarenakan program ini sangat membantu perekonomian masyarakat kelompok ps desa sidodadi (Ravazzoli, 2021). Jika flashback ke masa lalu dahulu masyarakat sangat ketakutan saat menggarap lahan karena adanya polisi hutan yang selalu mengontrol pergerakan petani saat menggarap lahan. Namun setelah diturunkannya program ps serta mendapatkan surat perizinan akses legal masyarakat sangat bersyukur dan sudah leluasa dalam mengelola (Karasmanaki, 2021).

6. Aspek Ketepatan

Berdasarkan aspek bahwa 'Program perhutanan sosial sudah tepat dilaksanakan di desa sidodadi dimana program ini dapat meningkatkan kesejahteraan namun tujuannya slogan diawal masih belum tercapai dikarenakan memiliki kendala yang terletak pada hutan, saat ini bisa dikatakan 30% hutan masih belum lestari terdapat lahan yang gundul jika melihat kondisi ekonomi masyarakat setelah adanya program ps ini sudah dapat terlihat 70% sejahterah

Simpulan

Dalam sistem pengelolaan program perhutanan sosial di desa Sidodadi masih belum berjalan secara efektif, dikarenakan masih terdapat permasalahan yang terjadi baik di lapangan maupun pada kepengurusan selanjutnya dalam peranggotaan program pasti ada namanya pro dan kontra ada sebuah dukungan dan ada penolakan, sama hal nya pada anggota kps sidomukti desa sidodadi dimana terdapat beberapa masyarakat yang merasa sangat puas adanya program ini dikarenakan program ps ini merupakan program langsung dari menteri lingkungan dan kehutanan sehingga tidak ada sanggahan dari pihak manapun justru mendapatkan dukungan lebih dari pihak rektoral. namun disisi lain ada beberapa masyarakat yang merasa tidak puas malah memunculkan rasa iri. perlu diketahui tidak semuanya masyarakat desa sidodadi terdaftar dalam anggota kps, hanya beberapa masyarakat yang terverifikasi sesuai dengan persyaratan yang tertera, lalu adapun manfaat bagi masyarakat yg tergabung dalam anggota kps dimana pada mulanya masyarakat tidak merasakan adanya manfaat hutan, kini mereka sudah merasakan manfaatnya. Program perhutanan sosial sudah tepat dilaksanakan di desa sidodadi dimana program ini dapat meningkatkan kesejahteraan namun tujuannya slogan diawal masih belum tercapai dikarenakan memiliki kendala yang terletak pada hutan, saat ini bisa dikatakan 30% hutan masih belum lestari terdapat lahan yang gundul jika melihat kondisi ekonomi masyarakat setelah adanya program ps ini sudah dapat terlihat 70% sejahtera

Daftar Pustaka

- Agusti, T. M., Nurjaya, I. N., & Koeswahyono, I. (2019). Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Hutan. *J Hut Trop*, 4.
- Bong, I. W. (2019). What is success? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184>
- Erbaugh, J. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>
- Fisher, M. R. (2018). Assessing the New Social Forestry Project in Indonesia: Recognition, Livelihood and Conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Fisher, M. R. (2019). The politics, economies, and ecologies of indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- J Hut Trop. (2022). Peran Program Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan (Studi Kasus Indepth Interview Perhutanan Sosial Fungsi Statistik Kehutanan BPS 2021. 6(2).
- Karasmanaki, E. (2021). Impacts of social distancing during COVID-19 pandemic on the daily life of forestry students. *Children and Youth Services Review*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105781>

- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2017). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Tranmigrasi di Kabupaten Mahakam (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Lo, K. (2021). Authoritarian environmentalism, just transition, and the tension between environmental protection and social justice in China's forestry reform. *Forest Policy and Economics*, 131. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102574>
- Ludvig, A. (2018). Social innovation in the Welsh Woodlands: Community based forestry as collective third-sector engagement. *Forest Policy and Economics*, 95, 18–25. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.07.004>
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10–18.
- Maier, C. (2018). Navigating social forestry – A street-level perspective on National Forest management in the US Pacific Northwest. *Land Use Policy*, 70, 432–441. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.031>
- Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(1).
- Octavia, D. (2022). Mainstreaming Smart Agroforestry for Social Forestry Implementation to Support Sustainable Development Goals in Indonesia: A Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/su14159313>
- Oleh, D., & Azhar, L. T. (2021). *Evalusi Program Perhutanan Sosial di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*.
- Price, C. (2018). Declining discount rate and the social cost of carbon: Forestry consequences. *Journal of Forest Economics*, 31, 39–45. <https://doi.org/10.1016/j.jfe.2017.05.003>
- Rakatama, A. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Ravazzoli, E. (2021). Can social innovation make a change in european and mediterranean marginalized areas? Social innovation impact assessment in agriculture, fisheries, forestry, and rural development. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–27. <https://doi.org/10.3390/su13041823>
- Rogelja, T. (2018). Implications of policy framework conditions for the development of forestry-based social innovation initiatives in Slovenia. *Forest Policy and Economics*, 95, 147–155. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.07.011>
- Roslinda, E., Rianti, R., & Ershinta, H. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 16(2), 128–141.
- Sahide, M. A. K. (2020a). Prophets and profits in Indonesia's social forestry partnership schemes: Introducing a sequential power analysis. *Forest Policy and Economics*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102160>

-
- Sahide, M. A. K. (2020b). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Tajuddin, T. (2019). Bridging social forestry and forest management units: Juxtaposing policy imaginaries with implementation practices in a case from Sulawesi. *Forest and Society*, 3(1), 97–113. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6049>
- Wong, G. Y. (2020). Social forestry in Southeast Asia: Evolving interests, discourses and the many notions of equity. *Geoforum*, 117, 246–258. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.10.010>
- Wulandari, C. (2018). The Importance of Social Learning for the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of Community Forestry in Lampung Province. *Small-Scale Forestry*, 17(3), 361–376. <https://doi.org/10.1007/s11842-018-9392-7>
- Zet, L., & et al. (n.d.). *Peran Program Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan (Studi Kasus Indepth Interview Perhutanan Sosial Fungsi Statistik Kehutanan BPS 2021)*. 6.